

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1368//IO2/Kep/OT/1996

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Nasional Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Republik Indonesia (Lembaga PPM Republik Indonesia) Cabang Bandung untuk mendirikan SMEA LPPM RI di Majalaya Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga PPM Republik Indonesia Nomor 617/DK/PPM/I/96 tanggal 27 Januari 1996.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga PPM Republik Indonesia Cabang Bandung telah mengusahakan didirikannya SMEA LPPM ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga PPM Republik Indonesia Cabang Bandung untuk mendirikan SMEA LPPM RI di Majalaya Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 070/IO2.5/E/1996 tanggal 6 Pebruari 1996;
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bandung Nomor 041/IO2.10/R.96 tanggal 26 Januari 1996;
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Bandung Nomor 642.2/163/Sosial tanggal 26 Januari 1996;

Memperhatikan pula.....

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Muchlis Munir, SH Nomor 6 tanggal 15 Juli 1995 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Nasional Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Republik Indonesia Cabang Bandung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Lembaga PPM Republik Indonesia Cabang Bandung untuk mendirikan SMEA LPPM RI di Majalaya Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 29 Februari 1996.



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Barat,

N. S. H. S YUSUPADI
NIP. 130143600

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Kab. Bandung;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bandung.